



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1707, 2017

BNPT. Nama dan Kelas Jabatan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN NAMA DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesesuaian antara tanggung jawab dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nama dan kelas jabatan pada sejumlah jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa telah diterbitkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/161/M.SM.04.00/2017 tanggal 31 Mei 2017, perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Penyesuaian Nama dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636 Tahun 2013);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Per-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG PENYESUAIAN NAMA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

Pasal 1

Menyesuaikan nama dan kelas jabatan sejumlah jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Penyesuaian nama dan kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan peta jabatan, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, pengembangan pegawai, mutasi pegawai dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 3

Apabila dalam penyesuaian dimaksud tidak diperlukan pengangkatan dalam literatur jabatan yang baru, maka penyesuaian tunjangan kinerja dengan kelas jabatan yang baru dilakukan terhitung mulai sejak perhitungan kinerja bulan Februari 2017 yang tempo dan prosedur pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 4

Apabila dalam penyesuaian dimaksud diperlukan pengangkatan dalam literatur jabatan yang baru, maka penyesuaian tunjangan kinerja dengan nama dan kelas jabatan yang baru dilakukan terhitung mulai sejak pegawai yang bersangkutan menduduki jabatan yang baru sesuai

dengan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan serta tempo dan prosedur pembayarannya disesuaikan dengan ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Badan ini, maka Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor Kep-77/K.BNPT/11/2012 tentang Kelas Jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Juli 2017

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUHARDI ALIUS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYESUAIAN NAMA DAN KELAS JABATAN
 DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL,
 KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala		1
2	Sekretaris Utama	17	1
3	Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat	15	1
4	Kepala Bagian Perencanaan	12	1
5	Kepala Subbagian Penyusunan Program	9	1
6	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran	9	1
7	Kepala Bagian Data dan Pelaporan	12	1
8	Kepala Subbagian Data	9	1
9	Kepala Subbagian Pelaporan	9	1
10	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	12	1
11	Kepala Subbagian Hukum	9	1
12	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	9	
13	Kepala Biro Umum	15	1
14	Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	12	1

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)
15	Kepala Subbagian Tata Usaha Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Protokol dan Pengamanan	9	1
16	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9	1
17	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	9	1
18	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi	9	1
19	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	9	1
20	Kepala Subbagian Tata Usaha Deputy Kerjasama Internasional	9	1
21	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9	1
22	Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi	12	1
23	Kepala Subbagian Kepegawaian	9	1
24	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	1
25	Kepala Bagian Keuangan	12	1
26	Kepala Subbagian Akuntansi dan Verifikasi	9	1
27	Kepala Subbagian Administrasi Keuangan	9	1
28	Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi	17	1
29	Direktur Pencegahan	15	1
30	Kepala Subdirektorat Pengawasan	12	1
31	Kepala Seksi Pengawasan Jaringan	9	
32	Kepala Seksi Pengawasan Barang	9	
33	Kepala Subdirektorat Kontra Propaganda	12	1
34	Kepala Seksi Penggalangan	9	
35	Kepala Seksi Media Literasi	9	
36	Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat	12	1
37	Kepala Seksi Penelitian dan Evaluasi	9	

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)
38	Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat	9	
39	Direktur Perlindungan	15	1
40	Kepala Subdirektorat Pengamanan Obyek Vital dan Transportasi	12	1
41	Kepala Seksi Pengamanan Obyek Vital	9	
42	Kepala Seksi Pengamanan Transportasi	9	
43	Kepala Subdirektorat Pengamanan Lingkungan	12	
44	Kepala Seksi Pengamanan Lingkungan Umum	9	
45	Kepala Seksi Pengamanan Lingkungan Pemerintahan	9	1
46	Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme	12	1
47	Kepala Seksi Pemulihan Korban	9	
48	Kepala Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana	9	
49	Direktur Deradikalisasi	15	1
50	Kepala Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan	12	
51	Kepala Seksi Identifikasi Narapidana	9	1
52	Kepala Seksi Bina Narapidana	9	1
53	Kepala Subdirektorat Bina Dalam Masyarakat	12	1
54	Kepala Seksi Identifikasi Dalam Masyarakat	9	
55	Kepala Seksi Bina Dalam Masyarakat	9	
56	Kepala Subdirektorat Bina Dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Teroris	12	1
57	Kepala Seksi Materi Pembinaan	9	1
58	Kepala Seksi Administrasi dan Pengamanan	9	
59	Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	17	1
60	Direktur Penindakan	15	1
61	Kepala Subdirektorat Intelijen	12	1

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)
62	Kepala Seksi Operasional Intelijen	9	
63	Kepala Seksi Analisis Intelijen	9	
64	Kepala Subdirektorat Teknologi Informasi	12	1
65	Kepala Seksi Pengumpulan Data	9	1
66	Kepala Seksi Pengolahan Data	9	1
67	Kepala Subdirektorat Kesiapsiagaan dan Pengendalian Krisis	12	1
68	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	9	
69	Kepala Seksi Pengendalian Krisis	9	
70	Direktur Pembinaan Kemampuan	15	1
71	Kepala Subdirektorat Pelatihan	12	1
72	Kepala Seksi Perencanaan Latihan	9	
73	Kepala Seksi Pelaksanaan Latihan	9	
74	Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Operasi	12	1
75	Kepala Seksi Penyusunan Sistem Operasi	9	
76	Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi	9	
77	Kepala Subdirektorat Penggunaan Kekuatan	12	
78	Kepala Seksi Pengerahan Kekuatan	9	
79	Kepala Seksi Pemberdayaan Kemampuan	9	
80	Direktur Penegakan Hukum	15	1
81	Kepala Subdirektorat Perlindungan Aparat Penegak Hukum	12	1
82	Kepala Seksi Litigasi dan Advokasi	9	1
83	Kepala Seksi Pengamanan Aparat Penegakan Hukum	9	
84	Kepala Subdirektorat Hubungan Antar Lembaga Aparat Penegak Hukum	12	1
85	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Pusat	9	

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)
86	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah	9	1
87	Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Penegakan Hukum	12	1
88	Kepala Seksi Analisis dan Identifikasi	9	1
89	Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan	9	
90	Deputi Bidang Kerjasama Internasional	17	1
91	Direktur Kerjasama Bilateral	15	1
92	Kepala Subdirektorat Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika	12	1
93	Kepala Seksi Kerjasama Asia Pasifik	9	
94	Kepala Seksi Kerjasama afrika dan Timur Tengah	9	
95	Kepala Subdirektorat Kerjasama Amerika dan Eropa	12	1
96	Kepala Seksi Kerjasama Amerika	9	
97	Kepala Seksi Kerjasama Eropa	9	
98	Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral	15	1
99	Kepala Subdirektorat Kerjasama Regional	12	
100	Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah	9	
101	Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	9	
102	Kepala Subdirektorat Kerjasama Multilateral	12	1
103	Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah	9	
104	Kepala Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	9	
105	Direktur Perangkat Hukum Internasional	15	1
106	Kepala Subdirektorat Konvensi dan Resolusi Internasional	12	1
107	Kepala Seksi Konvensi Internasional	9	
108	Kepala Seksi Resolusi Badan-Badan Internasional	9	

NO.	NAMA JABATAN STRUKTURAL	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)
109	Kepala Subdirektorat Perlindungan WNI dan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	12	1
110	Kepala Seksi Perlindungan WNI	9	
111	Kepala Seksi Perlindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	9	
112	Inspektur	15	1
113	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	1

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

SUHARDI ALIUS

LAMPIRAN II
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENYESUAIAN NAMA DAN KELAS JABATAN
 DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN TERORISME

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS
 JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SEKRETARIAT UTAMA			
	Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat			
1	Analisis Perencanaan Anggaran	Subbagian Penyusunan Anggaran	7	1
2	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Subbagian Penyusunan Anggaran	7	
3	Pengolah Data	Subbagian Penyusunan Anggaran	6	
4	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Subbagian Penyusunan	7	1

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Program		
5	Penyusun Program dan Kegiatan	Subbagian Penyusunan Program	7	
6	Pengolah Data	Subbagian Penyusunan Program	6	
7	Analisis Data dan Informasi	Subbagian Data	7	1
8	Pengelola Database	Subbagian Data	6	
9	Pengolah Data	Subbagian Data	6	
10	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Pelaporan	7	1
11	Pengolah Data	Subbagian Pelaporan	6	
12	Analisis Hukum	Subbagian Hukum	7	
13	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	Subbagian Hukum	7	1
14	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Perundang-undangan	Subbagian Hukum	7	
15	Analisis Produk Hukum	Subbagian Hukum	7	
16	Analisis Rancangan Naskah Perjanjian	Subbagian Hukum	7	
17	Pengadministrasian Hukum	Subbagian Hukum	5	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Analisis Hubungan Masyarakat dan Protokol	Subbagian Hubungan Masyarakat	7	1
19	Analisis Kerja Sama	Subbagian Hubungan Masyarakat	7	
20	Analisis Publikasi	Subbagian Hubungan Masyarakat	7	
21	Analisis Tata Usaha	Subbagian Hubungan Masyarakat	7	
22	Penyusun Rencana Kehumasan dan Perpustakaan	Subbagian Hubungan Masyarakat	7	
23	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	Subbagian Hubungan Masyarakat	6	
24	Pengelola Pengaduan Publik	Subbagian Hubungan Masyarakat	6	
25	Pengelola Dokumentasi	Subbagian Hubungan Masyarakat	6	
	Biro Umum			
26	Analisis Tata Usaha	Subbagian Tata Usaha Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Protokol dan	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pengamanan		
27	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Tata Usaha Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Protokol dan Pengamanan	7	
28	Analisis Data dan Informasi	Subbagian Tata Usaha Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Protokol dan Pengamanan	7	
29	Pengelola Tata Naskah	Subbagian Tata Usaha Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Protokol dan Pengamanan	6	
30	Pranata Kearsipan	Subbagian Tata Usaha Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Protokol dan Pengamanan	6	
31	Petugas Protokol	Subbagian Tata Usaha Badan Nasional	5	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penanggulangan Terorisme, Protokol dan Pengamanan		
32	Ajudan	Subbagian Tata Usaha Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Protokol dan Pengamanan	5	
33	Pengadministrasi Umum	Subbagian Tata Usaha Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Protokol dan Pengamanan	5	
34	Petugas Keamanan	Subbagian Tata Usaha Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Protokol dan Pengamanan	3	
35	Analisis Tata Usaha	Subbagian Tata Usaha Kepala	7	
36	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Tata Usaha Kepala	7	
37	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Subbagian Tata Usaha Kepala	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38	Pengolah Data	Subbagian Tata Usaha Kepala	6	
39	Pranata Kearsipan	Subbagian Tata Usaha Kepala	6	
40	Analisis Tata Usaha	Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	7	
41	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	7	
42	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	7	
43	Pengolah Data	Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	6	
44	Pranata Kearsipan	Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama	6	
45	Analisis Tata Usaha	Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi	7	1
46	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ⁿ ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Deradikalisasi		
47	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi	7	
48	Pengolah Data	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi	6	
49	Pranata Kearsipan	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi	6	
50	Analisis Tata Usaha	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	7	1
51	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Penindakan dan	7	1

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembinaan Kemampuan		
52	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	7	
53	Pengolah Data	Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	6	
54	Pranata Kearsipan	Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan	6	
55	Analisis Tata Usaha	Subbagian Tata Usaha Deputi Kerjasama Internasional	7	
56	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Tata Usaha Deputi Kerjasama Internasional	7	
57	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Subbagian Tata Usaha Deputi Kerjasama Internasional	7	
58	Pengolah Data	Subbagian Tata	6	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Usaha Deputi Kerjasama Internasional		
59	Pranata Kearsipan	Subbagian Tata Usaha Deputi Kerjasama Internasional	6	
60	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	7	
61	Analisis Sistem Informasi	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	7	1
62	Pengelola BMN	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	7	1
63	Pengelola Kendaraan	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	6	
64	Pranata Barang dan Jasa	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	6	
65	Pengolah Data	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	6	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
66	Pengelola Bangunan dan Gedung	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	6	
67	Teknisi Pemeliharaan Sarpras	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	5	
68	Pengemudi	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	3	
69	Pramu Bakti	Subbagian Rumah Tangga, dan Perlengkapan	1	
70	Pengelola Kepegawaian	Subbagian Kepegawaian	7	1
71	Analisis Kerjasama Diklat	Subbagian Kepegawaian	7	
72	Pengelola Kepegawaian	Subbagian Kepegawaian	6	
73	Pengelola Tata Naskah	Subbagian Kepegawaian	6	
74	Pengolah Data	Subbagian Kepegawaian	6	
75	Analisis Kelembagaan	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	7	
76	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	7	1

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
77	Analisis Jabatan	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	7	
78	Analisis Kinerja	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	7	1
79	Pengelola Disiplin Pegawai	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	6	
80	Pengolah Data	Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	6	
81	Analisis Keuangan	Subbagian Akuntansi dan Verifikasi	7	
82	Analisis Laporan Keuangan	Subbagian Akuntansi dan Verifikasi	7	1
83	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	Subbagian Akuntansi dan Verifikasi	7	1
84	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Subbagian Akuntansi dan Verifikasi	6	
85	Pengolah Data	Subbagian Akuntansi dan Verifikasi	6	
86	Verifikator Keuangan	Subbagian Akuntansi dan Verifikasi	6	
87	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	Subbagian Administrasi	7	1

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Keuangan		
88	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Subbagian Administrasi Keuangan	7	
89	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Subbagian Administrasi Keuangan	7	1
90	Pengelola Keuangan	Subbagian Administrasi Keuangan	6	
91	Pengelola Gaji	Subbagian Administrasi Keuangan	6	
92	Pengolah Data	Subbagian Administrasi Keuangan	6	
93	Pengadministrasi Keuangan	Subbagian Administrasi Keuangan	5	
	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN DAN DERADIKALISASI			
	Direktorat Pencegahan			
94	Analisis Bidang Pengawasan	Seksi Pengawasan Jaringan	7	1
95	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengawasan Jaringan	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
96	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Pengawasan Jaringan	7	
97	Analisis Bidang Pengawasan	Seksi Pengawasan Barang	7	
98	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengawasan Barang	7	
99	Analisis Intelijen	Seksi Penggalangan	7	
100	Analisis Data dan Informasi	Seksi Penggalangan	7	1
101	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Penggalangan	7	
102	Analisis Berita	Seksi Media Literasi	7	1
103	Pengolah Data	Seksi Media Literasi	6	
104	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Penelitian dan Evaluasi	7	1
105	Pengolah Data	Seksi Penelitian dan Evaluasi	6	
106	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Seksi Partisipasi Masyarakat	7	
107	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Partisipasi Masyarakat	7	
	Direktorat Perlindungan			

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
108	Analisis Penanganan Objek Vital dan Transportasi	Seksi Pengamanan Obyek Vital	7	1
109	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengamanan Obyek Vital	7	
110	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Pengamanan Obyek Vital	7	
111	Analisis Kerja Sama	Seksi Pengamanan Obyek Vital	7	
112	Analisis Penanganan Objek Vital dan Transportasi	Seksi Pengamanan Transportasi	7	
113	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengamanan Transportasi	7	
114	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Pengamanan Transportasi	7	
115	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengamanan Lingkungan Umum	7	1
116	Analisis Kerja Sama	Seksi Pengamanan Lingkungan Umum	7	
117	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Pengamanan Lingkungan	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Umum		
118	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengamanan Lingkungan Pemerintah	7	
119	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Pengamanan Lingkungan Pemerintah	7	
120	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemulihan Korban	7	
121	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Pemulihan Korban	7	
122	Analisis Kerja Sama	Seksi Pemulihan Korban	7	1
123	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana	7	
124	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Pemulihan Sarana dan Prasarana	7	
	Direktorat Deradikalisasi			
125	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Identifikasi Narapidana	7	1
126	Pengolah Data	Seksi Identifikasi Narapidana	6	
127	Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi	Seksi Bina Narapidana	7	1
128	Analisis Monitoring,	Seksi Bina	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Evaluasi dan Pelaporan	Narapidana		
129	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Bina Narapidana	7	
130	Pengelola Warga Binaan Pemasyarakatan	Seksi Bina Narapidana	6	
131	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Identifikasi Dalam Masyarakat	7	
132	Analisis Data dan Informasi	Seksi Identifikasi Dalam Masyarakat	7	
133	Pengolah Data	Seksi Identifikasi Dalam Masyarakat	6	
134	Analisis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	Seksi Bina Dalam Masyarakat	7	1
135	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Bina Dalam Masyarakat	7	1
136	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Materi Pembinaan	7	
137	Penyuluh Narapidana	Seksi Materi Pembinaan	7	
138	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Administrasi dan Pengamanan	7	
139	Pengolah Data	Seksi Administrasi dan Pengamanan	6	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN			
	Direktorat Penindakan			
140	Analisis Data Intelijen	Seksi Operasional Intelijen	7	
141	Analisis Data dan Informasi	Seksi Operasional Intelijen	7	
142	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Operasional Intelijen	7	1
143	Pengolah Data	Seksi Operasional Intelijen	6	
144	Analisis Data Intelijen	Seksi Analisis Intelijen	7	
145	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Analisis Intelijen	7	
146	Pengolah Data Intelijen	Seksi Analisis Intelijen	6	
147	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Pengumpulan Data	7	
148	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengumpulan Data	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
149	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Pengolahan Data	7	
150	Pengelola Teknologi Informasi	Seksi Pengolahan Data	6	
151	Pengolah Data	Seksi Pengolahan Data	6	
152	Analisis Kerjasama	Seksi Kesiapsiagaan	7	
153	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Kesiapsiagaan	7	
154	Pengelola Teknologi Informasi	Seksi Kesiapsiagaan	6	
155	Analisis Kerjasama	Seksi Pengendalian Krisis	7	
156	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Pengendalian Krisis	7	
157	Pengelola Teknologi Informasi	Seksi Pengendalian Krisis	6	
	Direktorat Pembinaan Kemampuan			
158	Analisis Kerjasama Pelatihan	Seksi Perencanaan Latihan	7	
159	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Perencanaan Latihan	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
160	Analisis Kerjasama	Seksi Pelaksanaan Latihan	7	
161	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Pelaksanaan Latihan	7	
162	Analisis Kerjasama	Seksi Penyusunan Sistem Operasi	7	
163	Penyusunan Program dan Kegiatan	Seksi Penyusunan Sistem Operasi	7	
164	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengelolaan Sistem Informasi	7	
165	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Pengelolaan Sistem Informasi	7	
166	Pengolah Data	Seksi Pengelolaan Sistem Informasi	6	
167	Analisis Kerjasama	Seksi Pengerahan Kekuatan	7	
168	Penyusunan Program dan Kegiatan	Seksi Pengerahan Kekuatan	7	
169	Penyusun Kerjasama Pelatihan	Seksi Pemberdayaan Kemampuan	7	
170	Analisis Monitoring, Evaluasi dan	Seksi Pemberdayaan	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaporan	Kemampuan		
	Direktorat Penegakan Hukum			
171	Analisis Kerja Sama	Seksi Litigasi dan Advokasi	7	
172	Analisis Pelayanan	Seksi Litigasi dan Advokasi	7	
173	Analisis Kerjasama Aparat Penegak Hukum	Seksi Litigasi dan Advokasi	7	
174	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Litigasi dan Advokasi	7	1
175	Pengelola Data	Seksi Litigasi dan Advokasi	6	
176	Analisis Kerja Sama	Seksi Pengamanan Aparat Penegakan Hukum	7	
177	Analisis Data dan Informasi	Seksi Pengamanan Aparat Penegakan Hukum	7	
178	Analisis Kerjasama Aparat Penegak Hukum	Seksi Pengamanan Aparat Penegakan Hukum	7	
179	Analisis Monitoring, Evaluasi dan	Seksi Pengamanan	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pelaporan	Aparat Penegakan Hukum		
180	Analisis Pelayanan	Seksi Pengamanan Aparat Penegakan Hukum	7	
181	Analisis Pemasarakatan	Seksi Pengamanan Aparat Penegakan Hukum	7	
182	Analisis Kerja Sama	Seksi Hubungan Antar Lembaga Pusat	7	
183	Analisis Kerjasama Aparat Penegak Hukum	Seksi Hubungan Antar Lembaga Pusat	7	
184	Analisis Penyidikan	Seksi Hubungan Antar Lembaga Pusat	7	
185	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Hubungan Antar Lembaga Pusat	7	1
186	Pemeriksa Pengadilan	Seksi Hubungan Antar Lembaga Pusat	7	
187	Pengelola Data	Seksi Hubungan Antar Lembaga Pusat	6	
188	Analisis Kerja Sama	Seksi Hubungan Antar Lembaga	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Daerah		
189	Analisis Kerjasama Aparat Penegak Hukum	Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah	7	
190	Analisis Penyidikan	Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah	7	
191	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Hubungan Antar Lembaga Daerah	7	
192	Analisis Data dan Informasi	Seksi Analisis dan Identifikasi	7	
193	Analisis Kerjasama Aparat Penegak Hukum	Seksi Analisis dan Identifikasi	7	
194	Penyusun Program dan Kegiatan	Seksi Analisis dan Identifikasi	7	
195	Pengelola Banding dan Gugatan	Seksi Analisis dan Identifikasi	6	
196	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Seksi Analisis dan Identifikasi	6	
197	Pengelola Data	Seksi Analisis dan Identifikasi	6	
198	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Evaluasi dan Laporan	7	
199	Analisis Kerjasama Aparat Penegak Hukum	Seksi Evaluasi dan Laporan	7	
200	Pengolah Data Perkara dan Putusan	Seksi Evaluasi dan Laporan	6	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
201	Pengelola Berkas Peninjauan Kembali	Seksi Evaluasi dan Laporan	6	
	DEPUTI BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL			
	Direktorat Kerjasama Bilateral			
202	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Kerjasama Asia Pasifik	7	
203	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kerjasama Asia Pasifik	7	
204	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Kerjasama Asia Pasifik	7	1
205	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Kerjasama Afrika dan Timur Tengah	7	
206	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kerjasama Afrika dan Timur Tengah	7	
207	Penyusunan Program dan Kegiatan	Seksi Kerjasama Afrika dan Timur Tengah	7	
208	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Kerjasama Amerika	7	
209	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kerjasama Amerika	7	1
210	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Kerjasama Amerika	7	
211	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Kerjasama Eropa	7	1

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
212	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kerjasama Eropa	7	
213	Penyusunan Program dan Kegiatan	Seksi Kerjasama Eropa	7	
	Direktorat Kerjasama Regional dan Multilateral			
214	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah	7	
215	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah	7	
216	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah	7	1
217	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	7	
218	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	7	1
219	Penyusunan Program dan Kegiatan	Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	7	
220	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah	7	
221	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah	7	1

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
222	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Kerjasama Lembaga Pemerintah	7	
223	Analisis Data dan Informasi	Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	7	
224	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	7	
225	Penyusunan Program dan Kegiatan	Seksi Kerjasama Lembaga Non Pemerintah	7	1
	Direktorat Perangkat Hukum Internasional			
226	Analisis Data dan Informasi	Seksi Konvensi Internasional	7	1
227	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Konvensi Internasional	7	
228	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Konvensi Internasional	7	
229	Analisis Data dan Informasi	Seksi Resolusi Badan-Badan Internasional	7	
230	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Resolusi Badan-Badan Internasional	7	
231	Penyusunan Program dan Kegiatan	Seksi Resolusi Badan-Badan Internasional	7	

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
232	Analisis Data dan Informasi	Seksi Perlindungan WNI	7	
233	Analisis Kerja Sama	Seksi Perlindungan WNI	7	
234	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Seksi Perlindungan WNI	7	1
235	Analisis Data dan Informasi	Seksi Perlindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	7	
236	Analisis Kerjasama Luar Negeri	Seksi Perlindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	7	1
237	Penyusunan Program dan Kegiatan	Seksi Perlindungan Kepentingan Nasional di Luar Negeri	7	
	INSPEKTORAT			
238	Auditor Ahli Utama	Inspektorat	13	
239	Auditor Ahli Madya	Inspektorat	11	1
240	Auditor Ahli Muda	Inspektorat	9	
241	Auditor Ahli Pertama	Inspektorat	8	
242	Pemeriksa Pelaporan dan Transaksi	Inspektorat	7	4

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Keuangan			
243	Analisis Tata Usaha	Inspektorat	7	1
244	Pengadministrasi Umum	Inspektorat	5	
245	Pengadministrasi Keuangan	Inspektorat	5	

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
REPUBLIK INDONESIA,

ttđ

SUHARDI ALIUS